



Anggarkan Rp7 Miliar untuk Tekan Inflasi

■ Pemda DIY Segera Salurkan Subsidi Ongkir UMKM

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah DIY menyiapkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk menekan laju inflasi di daerah, imbas penyesuaian kenaikan harga BBM. Anggaran akan segera disalurkan ke masyarakat dengan bentuk subsidi ongkos kirim (ongkir) bagi pelaku UMKM serta penyelenggaraan operasi pasar.

Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, dana diperoleh dari 2 persen Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil). Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menuturkan, saat ini angka inflasi di DIY tergolong tinggi. Yakni, di atas angka 5 persen atau di atas rata-rata nasional.

"Yang andil cukup banyak kecuali sembako dan makanan, tiket pesawat itu harga melambung tinggi tapi tetap dibeli masyarakat nah itulah pemicu inflasi," terang Aji, Minggu (18/9).

Aji menjelaskan, subsidi ongkir bagi pelaku UMKM bukanlah hal baru. Program tersebut dicanangkan oleh Diskop UMKM DIY saat awal pandemi Covid-19 merebak. Tujuannya mengurangi beban pelaku UMKM akibat kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan. Pemda DIY pun memberi relaksasi kepada usaha kecil dengan menanggung ongkir atas pembelian produk UMKM. Sejalan ini tercatat ada sekitar 4.000 produk dari 1.800 pelaku usaha yang tergabung dalam program marketplace lokal yang tengah merasakan relaksasi pembayaran ongkir tersebut.

Dengan adanya dana tambahan, diharapkan ada lebih banyak pelaku UMKM yang dapat menerima manfaat. "Jadi kita tinggal te-

DORONG PERBAIKAN EKONOMI

- Pemerintah DIY menyiapkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk menekan laju inflasi.
- Anggaran akan segera disalurkan ke masyarakat dengan bentuk subsidi ongkir bagi pelaku UMKM serta penyelenggaraan operasi pasar.
- Dana diperoleh dari 2 persen Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil).
- Inflasi DIY di atas angka 5 persen atau di atas rata-rata nasional.

ruskan yang sudah ada lewat UMKM tinggal teruskan itu," terangnya.

Pemda DIY, lanjut Aji, juga akan menggelar operasi pasar. Kegiatan tersebut untuk menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat dan diprioritaskan menasar sejumlah komoditas yang memiliki pengaruh besar terhadap tingkat inflasi di DIY.

"Kita berikan bantuan juga untuk operasi pasar supaya kemampuan daya beli masyarakat dengan operasi masyarakat bisa lebih murah," paparnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Budiharto, mengatakan, angka inflasi di DIY pada Agustus lalu cenderung menurun jika dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, angka tersebut masih tergolong tinggi.

Dia merinci, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) DIY pada Agustus 2022 tercatat -0,12% (mtm). Dengan capaian tersebut secara tahunan tekanan inflasi berada pada level 5,52% (yoy). Angka ini sudah menunjukkan penurunan dari bulan lalu yang berada di angka 5,70%.

"Bulan Agustus DIY mengalami deflasi -0,12%, seiring panen komoditas hortikultura khususnya cabai, bawang merah, daging ayam, dan minyak goreng," kata Budiharto.

triwulan ke-II ekonomi DIY meningkat 5,20%, lebih tinggi dari triwulan 1 yang sebesar 2,91%. Pertumbuhan yang tinggi ini menunjukkan aktivitas masyarakat yang sudah mendekati normal, sehingga mendorong berlanjutnya perbaikan ekonomi.

Kepala Bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Danang Setiadi, mengatakan, naikan inflasi itu menjadi paling buruk selama ini, sebab biasanya angka inflasi di DIY antara 2 atau 3 persen sesuai amanat dari pemerintah pusat mengenai batas inflasi masing-masing daerah.

Dia menjelaskan, inflasi di DIY sempat menurun bahkan mengalami deflasi sebesar 0,12 persen pada April kemarin. Kemudian angka inflasi kembali naik bahkan sempat menyentuh angka 5,7 persen pada Juli lalu.

"Agustus turun sedikit. Mudah-mudahan trend inflasi kita menurun, meski kita tahu awal bulan ini ada kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM," jelas Danang.

Danang berharap bulan ini pemerintah DIY dapat menjaga inflasi tetap stabil di bawah angka 5 persen. Angka inflasi yang tinggi menurutnya dapat mengganggu perputaran ekonomi di wilayah DIY. **(tro/hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005